BAB IV

PERBANDINGAN PEPATAH ADAT *NEKA DAKU NGONG DATA* DENGAN PERINTAH KETUJUH DEKALOG DAN IMPLIKASINYA BAGI KARYA PASTORAL DI MANGGARAI

Dalam bab ini akan dikaji inti dari penelitian ini, yaitu pepatah adat *neka daku ngong data* dalam masyarakat Manggarai dan perbandingannya dengan perintah ketujuh Dekalog serta implikasi pastoralnya. Pembahasan akan dimulai dengan menganalisis persamaan dan perbedaan antara pepatah adat *neka daku ngong data* dan perintah ketujuh Dekalog serta menelusuri korelasi esensial di antara keduanya. Selanjutnya, penulis akan menguraikan implikasi etis dan sosial dari tindakan mencuri bagi kehidupan manusia, serta mengeksplorasi mekanisme rekonsiliasi yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi implikasi negatif dari tindakan tersebut.

4.1 Kesamaan antara Pepatah Adat *Neka Daku Ngong Data* dan Perintah Ketujuh Dekalog

Polemik yang sering melingkupi kehidupan manusia sering kali didasari pengabaian terhadap nilai-nilai luhur. Hak kepemilikan yang merupakan salah satu pokok penting dalam kehidupan bersama, kerap kali memicu konflik karena minusnya kesadaran diri akan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, menghubungkan pepatah adat dan perintah ketujuh Dekalog merupakan upaya untuk menegaskan kembali urgensi nilai-nilai luhur dalam menegakkan keadilan dan menciptakan institusi yang adil.

Pepatah adat (*go'et*) *neka daku ngong data* dan perintah ketujuh Dekalog, kendatipun berasal dari konteks yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang fundamental dalam fungsi moralnya. Keduanya berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan individu dan masyarakat menuju pada kehidupan yang ideal.

Relasi keduanya tetap terpelihara hingga saat ini, karena dapat diinterpretasi dan direalisasikan sesuai dengan konteks zaman.

4.1.1 Menuntut Akuntabilitas

Pada umumnya, masyarakat menuntut suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang kuat dari individu yang menyimpang dari nilai-nilai luhur yang dihidupi masyarakat. Tanggung jawab itu sendiri dapat dipahami sebagai kesanggupan individu untuk tidak mengelak jika diminta penjelasan tentang perbuatannya. Manusia hadir sebagai penanggung jawab bagi yang lain. Herbert Spencer sebagaimana dikutip oleh Hassan berpendapat bahwa tanggung jawab bertautan dengan kemampuan beradaptasi di tengah kehidupan sosial yang memiliki nilai-nilainya tersendiri.¹³⁵ Rasa tanggung jawab harus dimiliki oleh seorang bukan karena takut pada sanksi sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran, melainkan sebuah tanggung jawab terhadap dirinya sebagai manusia yang otonom dan tanggung jawab kepada Pencipta.

Dalam masyarakat Manggarai, individu yang menyimpang dari nilai luhur yang telah disepakati bersama akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Sanksi yang diberikan bergantung pada besarnya pelanggaran dari pelaku. Sanksi tersebut lahir dari kesepakatan bersama dalam masyarakat Manggarai dan diberikan kepada pihak yang berwenang (*Tua golo, tua teno, dan tua kilo*).¹³⁶ Tidak ada dokumen yang tertulis jelas seperti Kitab Suci mengenai sanksi tersebut, tetapi telah mengakar dalam anggota masyarakat Manggarai secara lisan.

Pihak yang berwenang, meminta pertanggungjawaban dari pelaku di hadapan masyarakat dan diberi sanksi sesuai konsensus kolektif. Hal ini identik dengan pengaplikasian Dekalog, yakni pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan masyarakat dan kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama, pelaku harus dihukum dan didenda sebagai silih atas perbuatannya. Tujuan utamanya agar individu tersebut memiliki efek jera dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat (*the good society*).

¹³⁵Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 129.

¹³⁶Petrus Janggur, *op. cit.*, hlm. 194.

4.1.2 Mengedepankan Unitas

Kehidupan manusia tidak dapat dilepas pisahkan dari dinamika perselisihan. Perbedaan pendapat, keyakinan, dan cita-cita yang merupakan manifestasi dari pluralitas manusia, sering kali menjadi sumber konflik yang mengancam kohesi sosial dan perdamaian.¹³⁷ Memecah-belahkan spirit persatuan menyeret manusia pada sikap separatisme. Dalam upaya meminimalisasi sikap separatisme ini, norma-norma sosial, baik yang bersifat tradisional maupun universal, hadir sebagai pedoman yang menuntun individu untuk memahami pentingnya menjaga kesatuan sebagai cita-cita kolektif.

Masyarakat Manggarai dengan pluralitas suku, status sosial, dan keyakinan yang mewarnai kehidupan mereka dikukuhkan dalam *go'et* (pepatah adat) *muku ca pu'u neka woleng curup, teu ca ambo neka woleng lako*¹³⁸, yang menekankan bahwa persatuan merupakan cita-cita bersama dalam menghadapi pelbagai ketimpangan sosial.¹³⁹ *Go'et* tersebut berkelindan dengan *Go'et neka daku ngong data* yang menawarkan perspektif filosofis yang baru tentang hak kepemilikan dan keadilan sosial. *Go'et neka daku ngong data* dalam esensinya, mengajak anggota masyarakat untuk menyadari batasan hak kepemilikan dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain (*no harm*).

Dekalog yang bersumber dari tradisi yang berbeda, juga menekankan urgennya menjaga kesatuan dalam iman akan Yahweh. Bangsa Israel dengan latar belakang status sosial yang berbeda diintegrasikan oleh keyakinan yang sama.¹⁴⁰ Allah sebagai tujuan utama kehidupan mereka, menjadi landasan fundamental untuk mempertahankan integritas sosial. Prinsip ini menstimulasi individu untuk

¹³⁷Mikhail Coomans, *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 153.

¹³⁸*Muku*=pisang, *ca*= satu, *pu'u*=rumpun, *neka*=jangan, *woleng*=beda atau berbeda, *curup*=pendapat, *teu*=tebu, *ambo*= rimbun *lako*=jalan. Jika diterjemahkan secara harafiah berarti pisang satu rumpun jangan beda pendapat dan tebu satu rimbun harus jalan searah. Pisang satu rumpun di sini melambangkan komunitas yang mengedepankan kesatuan dan tidak boleh ada keributan yang memecahbelahkan spirit kesatuan, sedangkan tebu satu rimbun menggambarkan sikap toleransi di tengah kemajemukan. Artinya, kendatipun berbeda pendapat, tetapi tetap mengedepankan dialog dalam mencari solusi demi kebaikan bersama. Dalam konteks budaya Manggarai *go'et* ini bertujuan untuk mempersatukan segala perbedaan pendapat, keyakinan, dan suku. Petrus Janggur, *op. cit.*, hlm. 205.

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰Bernard Kieser, *Moral Dasar: Kaitan Iman dan Perbuatan, loc. cit.*

menyadari bahwa mereka tinggal dalam sebuah komunitas beriman. Allah telah memilih mereka sebagai bangsa pilihan untuk menjaga hukum-hukum yang diberikan-Nya. Oleh karena itu, tindakan mencuri merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah yang juga merusak persatuan, integritas, dan prinsip keadilan.

4.1.3 Sama-sama Berkembang dalam Tradisi

Pepatah adat *neka daku ngong data* merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan dalam tradisi masyarakat Manggarai. Pepatah ini, sering diekspresikan dalam kehidupan konkrit, yang berfungsi sebagai panduan moral, alarm penyadaran individu agar tidak menyimpang dari regulasi sosial yang dihidupi. Kendatipun tidak ada risalah formal yang menulis lahirnya pepatah ini, tetapi tetap memiliki kekuatan normatif yang mengikat kesatuan anggota masyarakat Manggarai.

Fenomena serupa juga terjadi dalam perintah ketujuh Dekalog, yang telah berakar dalam tradisi sebelum memperoleh otoritas Ilahi. Dekalog, kecuali tiga perintah pertama merupakan hasil akumulasi kebijaksanaan dari pelbagai suku dan budaya.¹⁴¹ Artinya, tradisi menjadi fondasi bagi Dekalog secara keseluruhan, termasuk perintah ketujuh yang membahas tentang larangan mencuri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *go'et neka daku ngong data* dan Dekalog berasal dari tradisi dan hidup dalam tradisi. *Go'et*, dihidupi oleh masyarakat Manggarai, sedangkan Dekalog dihidupi oleh bangsa Israel serta gereja universal. Keduanya memiliki peran untuk menciptakan masyarakat yang beradab, karena berfungsi sebagai imperatif moral yang terus diwariskan, berlaku secara universal dan lintas waktu.

4.1.4 Sama-sama Memperjuangkan Hak Asasi Manusia

Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prasyarat fundamental bagi peradaban suatu masyarakat. Masyarakat menjadikan martabat manusia sebagai keutamaan (*virtue*), menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang telah mencapai puncak peradaban

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 5.

(*civilized society*).¹⁴² Sebaliknya, pelanggaran HAM yang menafikan martabat dan kebebasan manusia merupakan indikator dekadensi moral dan kemanusiaan. Hal ini menandai masyarakat yang terperangkap dalam barbarisme. Penghormatan terhadap HAM merupakan upaya melawan masyarakat tirani dan rezim totalitarianisme yang berusaha membelenggu kebebasan dan mengeliminasi keluhuran moral.¹⁴³

Hak asasi dapat dimengerti sebagai realitas non-fisik yang melekat pada setiap pribadi dan tidak dapat dihapus oleh institusi manapun. Hak asasi adalah fakta terberi (*gift*) tanpa diintervensi oleh pihak lain. Meskipun masyarakat dapat melanggar hak-hak ini, eksistensi dan esensinya tetap tidak dapat berpengaruh, karena HAM merupakan bagian integral dari martabat manusia. Paus Yohanes XXIII sebagaimana yang dikutip Franz Magnis-Suseno menyatakan dukungannya terhadap hak-hak asasi manusia dalam ensiklik *Pacem In Terris* pada tahun 1963. Dalam dokumen tersebut, Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa hormat terhadap hak asasi manusia merupakan medium utama untuk membangun dunia yang damai. Dasar deliberatifnya adalah manusia akan bersedia menyelesaikan persoalan-persoalan jika martabat dan hak-haknya dihormati.¹⁴⁴

Dalam konteks pepatah adat *go'et neka daku ngong data* yang berarti “jangan mengklaim milikmu kepada kepunyaan orang lain orang lain,” terdapat penegasan kuat terhadap penghormatan atas hak milik pribadi. Pepatah ini mengandung imperatif moral yang secara langsung menolak segala bentuk perampasan, pencurian, atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Maka, jenis hak yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak atas kepemilikan pribadi atau hak milik (*right to property*).

Hak atas milik merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal, baik dalam sistem hukum internasional (seperti Pasal 17 dalam *Universal Declaration of Human Rights*) maupun dalam ajaran sosial Gereja Katolik. Dalam

¹⁴²James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, penerj. Titis Eddy Arini (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996), hlm. 38.

¹⁴³Franz Magnis-Suseno, *Beriman Dalam Masyarakat: Butir-butir Teologi Kontekstual* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 98.

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 95.

masyarakat Manggarai, melalui pepatah tersebut, hak milik dihargai bukan semata karena nilai ekonomis benda, tetapi karena menyangkut martabat dan kehormatan seseorang sebagai pemilik sah. Pelanggaran terhadap pepatah ini berarti bukan hanya pelanggaran terhadap norma sosial dan budaya, tetapi juga terhadap nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang menjunjung keadilan dan tanggung jawab.

Masyarakat Manggarai memiliki tradisi lisan yang kaya, yang di dalamnya terkandung pelbagai prinsip etos dan kemanusiaan. Pepatah adat (*go'et*) yang umumnya diawali dengan kata "*neka*" (jangan), sebagai imperatif moral yang menjamin penghormatan terhadap HAM. Misalnya, *neka tako* (jangan mencuri), *neka paki ata* (jangan membunuh), *neka ngoeng wina data* (jangan berzinah) merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Manggarai. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam *go'et neka daku ngong data* yang bertujuan menciptakan masyarakat yang *fair* dan manusiawi agar hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

Dekalog juga secara implisit menekankan HAM, terutama hak kepemilikan. Perintah ketujuh "Jangan mencuri" yang dalam konteks asalnya merujuk pada penculikan manusia, mengindikasikan betapa seriusnya pelanggaran terhadap kebebasan individu (bdk. Kel. 21:16). Perintah tersebut, yang bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah perbudakan, mempresentasikan pengalaman pahit umat Israel sebagai budak di Mesir.¹⁴⁵ Pengalaman tersebut menjadi asas kuat bagi mereka untuk menjunjung tinggi otonomi manusia dan menentang segala bentuk penindasan.

4.1.5 Menghormati Hak Milik

Konsep hak milik sebagai salah satu isu fundamental filsafat dan sosiologi telah menjadi subjek perdebatan yang tidak kunjung berakhir sepanjang sejarah. Hak milik, selain memiliki dimensi personal juga memiliki nilai sosial yang signifikan karena berperan dalam menjamin kebebasan individu, memenuhi kebutuhan dasar dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, konsep ini juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keadilan dan kesetaraan

¹⁴⁵Bernhard Kieser, *Paguyuban Manusia dengan Dasar Firman*, *op. cit.*, hlm. 81.

yang terus menjadi topik perdebatan dalam berbagai disiplin ilmu. Perintah ketujuh Dekalog menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan menggunakan harta benda secara bertanggung jawab (bdk. Kel. 20:15). Keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial dalam menafsirkan dan melaksanakan hak milik merupakan prinsip yang sangat mendesak dalam kehidupan sosial.

John Locke sebagaimana dikutip oleh Bertens menegaskan bahwa hak milik pribadi dalam masyarakat diperoleh melalui kerja, karena individu mempunyai hak untuk memanfaatkan hasil usahanya sendiri.¹⁴⁶ Pandangan Locke ini sejalan dengan Ensiklik *Laborem Exercens* dari Yohanes Paulus II, yang menaruh perhatian pada kerja manusia. Kerja, menurut Yohanes Paulus II, bukan hanya aktivitas fisik, melainkan juga ekspresi dari harkat dan martabat manusia yang menemukan pencetusannya melalui proses kreatif dan produktif.¹⁴⁷ Kerja dalam perspektif ini bukan hanya untuk memuaskan hasrat pribadi, melainkan kerinduan untuk membangun masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup, karena segala sesuatu berasal dari Allah.

Masyarakat Manggarai dalam sistem nilai dan etika yang dihidupi melihat pengakuan terhadap hak milik pribadi sebagai prinsip fundamental yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Konsep hak milik ini termanifestasi dalam pelbagai *go'et*. Salah satu *go'et* yang menjadi dasar untuk mengakui hak kepemilikan adalah *diha morin atau daku morin, neka daku ngong data* (Dia pemiliknya atau saya pemiliknya, jangan mengklaim milik saya terhadap kepunyaan orang lain).¹⁴⁸ Ungkapan ini mengafirmasi bahwa hak milik merupakan konsep dasar dalam masyarakat Manggarai yang dilindungi norma-norma sosial dan hukum adat. Pelanggaran terhadap hak milik, seperti merampas atau pencurian (*daku kat ngong data*), dianggap sebagai pelanggaran keras yang harus ditangani oleh pihak yang berwajib untuk menegakkan kembali keadilan dan menghindari permusuhan yang mencederai relasi antar-sesama.

¹⁴⁶K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hlm. 111.

¹⁴⁷Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, No. 04, penerj. Alb. Deby Setiyanto (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), hlm. 41.

¹⁴⁸Kanisius Teobaldus Deki, *op. cit.*, hlm. 135.

Dekalog juga menekankan hal yang sama bahwa hak milik menjadi suatu hal yang perlu diakui dalam interaksi sosial. Pengakuan akan hak milik termanifestasi dalam perintah ketujuh, kedelapan, dan kesepuluh yang melarang tindakan mencuri, memberi testimoni palsu untuk kepentingan diri (*self-serving*), dan mengingini istri sesama (Kel. 20:15-17).

4.1.6 Menegakkan Keadilan

Keadilan dapat diartikan memberikan kepada anggota masyarakat apa yang menjadi haknya. Keadilan penting untuk ditegakkan di tengah maraknya kasus ketidakadilan. Karena keadilan merujuk pada kehidupan manusia secara individual maupun kolektif (*common good*).¹⁴⁹ Keadilan tercapai hanya melalui pengontrolan diri dari nafsu ketamakan yang merongrong kehidupan secara holistik. Norma-norma sosial sebagai pengontrol sangat berperan penting dalam menjinakkan nafsu ketamakan. Sulit untuk dibendung ketika kehidupan masyarakat tidak menerapkan hukum yang dapat menegakkan keadilan.

Kisah eksodus bangsa Israel dari perbudakan, menyingkap kesadaran manusia akan pentingnya menegakkan keadilan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan dalam masyarakat. Firaun yang memperbudak bangsa Israel merupakan bentuk ketidakadilan terhadap sesama manusia pada Perjanjian Lama. Kehadiran perintah ketujuh Dekalog bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi kaum miskin dan tertindas. Dengan menegakkan keadilan, seseorang dapat menunjukkan martabatnya sebagai individu dan makhluk sosial serta merasa terlindungi.

Dalam kebudayaan Manggarai, masyarakat lebih bertendensi kepada keadilan distributif, yang menuntut keseimbangan dalam pembagian.¹⁵⁰ Hal ini direalisasikan dalam bentuk pembagian *Lingko* yang membutuhkan *tua teno* yang arif, tanpa pilih kasih. *Haju teno* biasanya menjadi simbol keadilan karena bentuk pohonnya yang lurus (*heluk*) dan tidak bercabang (*mbekot*).

¹⁴⁹K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 85.

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 86.

4.2 Perbedaan antara *Go'et Neka Daku Ngong Data* dan Perintah Ketujuh Dekalog

Selain persamaan, *go'et neka daku ngong data* dan perintah ketujuh Dekalog memiliki diferensiasi, terutama sumber dan perkembangan lanjutannya serta sanksi dan penerapannya. Pada bagian ini, akan diuraikan perbedaan antara keduanya.

4.2.1 Sumber dan Perkembangan Lanjutannya

Masyarakat Manggarai mengandalkan sistem norma sosial yang bersifat lisan dan informal. Mereka tidak memiliki dokumen tertulis yang jelas mengenai sanksi bagi para pelaku yang menyimpang dari norma sosial, tetapi masyarakat tetap tunduk di bawah sanksi yang diberikan. Pepatah adat *neka daku ngong data* hanya diwariskan secara lisan dan disetujui oleh anggota masyarakat untuk kebaikan bersama. Mengklaim milik orang lain sebagai milik pribadi tentu menimbulkan persoalan hak milik. Inilah tujuan utama dari pepatah ini, agar tetap memperhatikan hak kepemilikan anggota masyarakat. Penerapan pepatah ini tidak bergantung pada konteks, tetapi berlaku di manapun dan kapanpun. Berbeda Dekalog yang memiliki referensi tertulis dan konteks historis yang lebih spesifik.

Sumber utama Dekalog adalah Allah, karena Dia sendiri yang menulis dengan menggunakan jari tangan-Nya (bdk. Kel. 20: 1-17). Kehadiran Dekalog bertujuan untuk mengatur kehidupan umat Israel, baik dengan Allah maupun terhadap sesama manusia.¹⁵¹ Penerapan Dekalog ini hanya kepada orang Israel dan semua orang yang beriman kepada Yahweh. Namun, perintah ketujuh diakui secara universal untuk tetap memprioritaskan hak dan martabat manusia.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa *go'et neka daku ngong data* dan perintah ketujuh Dekalog berasal dari sumber yang berbeda. Selain sumber, konteks penerapannya juga berbeda. Pepatah adat *neka daku ngong data* tidak ada perkembangan lanjutannya. Artinya, tetap mempertahankan maksud asli para pendahulu masyarakat Manggarai. Lain halnya dengan perintah ketujuh

¹⁵¹Bernhard Kieser, *Paguyuban Manusia dengan Dasar Firman*, *loc. cit.*

Dekalog yang mengalami perkembangan. Namun, keduanya tetap aktual di tengah perkembangan zaman yang mengalami kemerosotan moral.

4.2.2 Mekanisme Sanksi dan Penerapannya

Sanksi diberikan kepada anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang dari moral yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan utama pemberian sanksi adalah mengontrol mekanisme sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Kehidupan bersama tidak bisa tanpa sanksi atau hukuman, karena dengan memberi sanksi, masyarakat merasa terlindungi dari ancaman ketidakadilan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Manggarai, pemberian sanksi bergantung pada besarnya larangan yang dibuat pelaku. Tetua adat berperan untuk menyalurkan hukuman yang sudah disepakati bersama. Sanksi yang diberikan berupa denda dan mengembalikan barang hasil curian. Sanksi bagi pelaku berzinah (*loma wina data*) adalah melunasi belis yang sudah diberikan oleh suami, sedangkan mencuri benda, baik itu *ceca mbate one mbaru* maupun *ceca mbate pe'ang tana* harus mengembalikan barang dan didenda berupa hewan maupun uang.¹⁵² Namun, sanksi yang non-fisik dalam masyarakat Manggarai ialah mendapat hukuman dari para leluhur (*empo*) yang muncul dalam *go'et itang diang, nangki tai*. Hukuman itu disebabkan oleh tindakan mencuri dan hanya dapat diketahui oleh *ata mata gerak* (paranormal). Hukumannya dapat berupa penyakit (*nemba*), kegagalan dalam usaha (*kawe toe haeng*), dan malapetaka selalu menimpa keluarga pelaku.¹⁵³

Sanksi atas pelanggaran terhadap Dekalog, tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teologis yang melibatkan hukuman langsung dari Tuhan. Pelanggaran terhadap Dekalog membawa manusia dalam kekelaman dosa dan mengalienasikannya dari komunitas sosial. Jika perintah ketujuh dilanggar, maka pencuri harus mengembalikan semua hasil curiannya, didenda, bahkan dihukum mati. Hukuman tersebut tidak hanya bersifat duniawi, tetapi dari segi spiritual yakni pencuri merasa

¹⁵²Petrus Janggur, *op. cit.*, hlm. 179-181.

¹⁵³Hasil wawancara via telepon dengan Hermanus De, salah satu tokoh adat asal Kampung Lenteng, Desa Compang Dari, Kecamatan Rahong Utara, pada 25 November 2024.

teralienasi dari Tuhan karena terbelenggu oleh dosa. Dosa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Tuhan yang merugikan diri sendiri dan kehidupan bersama.

4.3 Implikasi Perbandingan Pepatah Adat (*Go'et*) *Neka Daku Ngong Data* dengan Perintah Ketujuh Dekalog

Perbandingan antara pepatah adat Manggarai *Neka Daku Ngong Data* dan perintah ketujuh Dekalog "*Jangan mencuri*" bukan sekadar telaah tekstual dua sistem nilai, melainkan sebuah upaya membangun jembatan antara kearifan lokal dan ajaran iman kristiani dalam merespons persoalan etis di tengah masyarakat. Keduanya lahir dari ruang yang berbeda, satu dari tradisi lisan etnis dan satu lagi dari wahyu ilahi, tetapi memiliki kesamaan visi: menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain.

Dalam konteks karya pastoral di Manggarai, perbandingan ini menjadi sangat relevan untuk menggali nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip iman agar pewartaan Injil lebih membumi dan kontekstual. Dengan demikian, implikasi yang dihasilkan dari perbandingan ini tidak hanya memperkaya pemahaman teologis, tetapi juga menjadi pedoman konkret untuk mempertahankan Hak Asasi Manusia dan mencegah konflik sosial dalam terang iman Katolik.

4.3.1 Mempertahankan Hak Asasi Manusia

Mencuri adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri berarti memperkosa martabat luhur manusia. Hak asasi manusia perlu dihargai karena manusia itu sama. Dalam Dekalog, perintah jangan mencuri juga merujuk pada penculikan manusia untuk dijual sebagai budak.¹⁵⁴ Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam perjanjian Baru juga menegaskan hal yang sama tentang kesetaraan hak. Sebab, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, tetapi semuanya satu di dalam Kristus (Gal. 3: 28).

¹⁵⁴J.Kiswara., *loc. cit.*

Dalam masyarakat Manggarai, harta benda (*ceca*) bukan hanya dipandang sebagai aset material, melainkan dilihat sebagai warisan para leluhur yang memiliki nilai intrinsik (*ceca mbate data tu'a*). Warisan, khususnya benda-benda bersejarah diberikan kepada individu tertentu yang dianggap mampu menjaga mandat itu dengan baik. Individu tersebut biasa disebut *ata lamid* atau *ata caud*, yang memiliki perjanjian implisit dengan para leluhur untuk menjaga amanah tersebut. Menegasikan warisan tersebut dapat berdampak signifikan, tidak hanya bagi pemegangnya, tetapi juga warga kampung (*ca beo*).¹⁵⁵ Masyarakat maupun pemegangnya dapat mengalami musibah, bahkan kematian, sebagai konsekuensi dari pengingkaran janji tersebut. Oleh karena itu, mencuri dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan antara pepatah adat *Neka Daku Ngong Data* dan perintah ketujuh Dekalog memperkuat kesadaran moral masyarakat dari sisi budaya maupun agama. Dalam konteks pastoral, pendekatan ini mendukung kontekstualisasi perintah ketujuh agar lebih membumi dan relevan dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Selain itu, pencurian dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, baik dalam tradisi adat maupun Kitab Suci, yang menjadi dasar kuat untuk pendidikan nilai dan pembentukan karakter.

4.3.2 Pencegahan Konflik dan Rekonsiliasi Sosial

Dalam budaya Manggarai, pencurian bukan sekadar tindakan kriminal dalam arti hukum positif, melainkan merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kolektif yang dihayati secara turun-temurun. Ketika seseorang mencuri atau menyalahgunakan warisan tersebut, maka ia tidak hanya melanggar hukum sosial, tetapi juga menghancurkan ikatan spiritual dan kepercayaan bersama.¹⁵⁶

Tindakan seperti itu sangat berpotensi menimbulkan konflik internal dalam kampung atau antara keluarga, bahkan dapat berujung pada perpecahan (*bike agu behas*). Ketegangan sosial yang muncul sering kali sulit diselesaikan hanya dengan

¹⁵⁵Hasil wawancara via telepon dengan Hermanus De, salah satu tokoh adat asal Kampung Lenteng, Desa Compang Dari, Kecamatan Rahong Utara, pada 25 November 2024.

¹⁵⁶*Ibid.*

pendekatan hukum formal, karena konflik semacam ini menyentuh aspek yang lebih dalam dari sekadar kepemilikan: menyangkut kehormatan keluarga, harga diri suku, dan kesetiaan pada janji menjaga warisan leluhur. Bahkan dalam kepercayaan lokal, pengingkaran terhadap amanah leluhur diyakini dapat mendatangkan musibah atau bencana, baik dalam bentuk penyakit, kegagalan panen, hingga kematian mendadak sebagai konsekuensi spiritual.

Ajaran iman kristiani di sini sangat urgen, khususnya perintah "Jangan mencuri", sebagai pedoman moral universal yang bisa dijadikan pijakan refleksi dan rekonsiliasi. Pencurian tidak hanya dikecam karena merugikan orang lain secara materi, tetapi juga karena mencederai martabat manusia dan merusak relasi kasih yang seharusnya menjadi dasar kehidupan bersama. Prinsip-prinsip keadilan, kasih, dan pengampunan dalam ajaran kristiani menjadi kekuatan moral dan spiritual untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat pencurian.

Pendekatan seperti ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara lahiriah, tetapi juga menyembuhkan luka batin dan mengembalikan keseimbangan sosial dan mental.¹⁵⁷ Sinergi antara adat dan iman memberi masyarakat alat yang kuat untuk membangun kembali jembatan kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama yang sangat penting dalam membangun komunitas yang damai dan bermartabat. Dengan demikian, perbandingan antara keduanya tidak hanya bersifat normatif, tetapi membawa implikasi praktis dalam mencegah konflik dan menciptakan rekonsiliasi sosial yang menyentuh akar-akar budaya dan iman masyarakat Manggarai.

4.4 Bentuk Rekonsiliasi dari Dosa Mencuri

Istilah “rekonsiliasi” lebih ekstensif daripada “pengampunan”. Rekonsiliasi berasal dari kata latin yaitu *Concilium*, yang mengandaikan suatu proses “dialog eksentrik” untuk mencapai konsensus bersama. Rekonsiliasi bertautan dengan berbagai proses meluruskan kondisi yang tidak adil.¹⁵⁸ Rekonsiliasi lebih

¹⁵⁷Geiko Muller-Fahrenheit, *Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*, penerj. Georg Kirchberger dan Yosep M. Florisan (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2005), hlm. 7.

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 4-5.

menekankan penyembuhan (*healing*) dan pembaruan, melampaui sekadar negosiasi. Tujuannya adalah membebaskan manusia dari masa lalu yang terus menghantui kemitraan mereka sebagai ciptaan luhur. Spiral kekerasan yang mencederai cita rasa kebersamaan hanya bisa diatasi dengan jalan rekonsiliasi. Freidlander sebagaimana dikutip oleh Geiko menyatakan, rekonsiliasi berarti manusia harus saling pisah dan menghilang, lalu saling berjumpa lagi sesama manusia.¹⁵⁹

Mencuri dipandang sebagai pelanggaran moral yang mengganggu ketertiban sosial. Dalam rekonsiliasi, pelaku pencurian diharapkan untuk menyesali diri dan belajar dari kesalahan masa lalu. Harus diakui bahwa manusia dalam kompleksitasnya tidak selalu mampu dalam mengendalikan sepenuhnya naluri dan dorongan nafsunya.¹⁶⁰ Oleh karena itu, mengakui kesalahan dan saling mengampuni merupakan perkara kejujuran dan kemanusiaan.

4.4.1 Rekonsiliasi dalam Tradisi Manggarai

Kehidupan masyarakat Manggarai tidak terlepas dari dinamika konflik sosial. Namun, perselisihan yang mengganggu kesejahteraan bersama bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk merefleksikan makna persatuan. Hannah Arendt menyebut kondisi ini sebagai hasil tindakan alami manusia (*natural human actions*) yang tidak dapat dihindarkan.¹⁶¹ *Go'et neka bike ca lide agu neka behas ca cewak* adalah ungkapan yang mengantar anggota masyarakat Manggarai untuk tetap memetik makna persatuan di tengah kekeliruan manusia. Konflik, yang sering kali dipicu oleh distingsi paradigma dan kepentingan (*daku ngong data*), menuntut rekonsiliasi yang terus-menerus dilaksanakan. Rekonsiliasi bukan sekadar untuk meredam konflik, melainkan sebuah proses transformatif yang bertujuan menciptakan kedamaian sebagai cita-cita bersama (*mose renceng*).¹⁶²

Kedamaian, sebagai tujuan akhir dari setiap dinamika sosial, hanya dapat diimplementasi melalui proses rekonsiliasi. Masyarakat Manggarai menyebut

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁶⁰*Ibid.*, hlm. 38.

¹⁶¹Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958), hlm. 240.

¹⁶²Petrus Janggur, *op. cit.*, hlm. 61.

proses rekonsiliasi ini dengan istilah “*hambor*”, yang dalam konteks masyarakat Manggarai bukan sekadar “berdamai” dalam arti sempit, melainkan proses pemulihan relasi yang holistik, meliputi relasi antara sesama (*hae ata*), arwah leluhur (*wura ceki*), lingkungan, dan Tuhan (*Mori Keraeng*).¹⁶³ Proses *hambor* terjadi ketika individu saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan, menandai kembalinya keselarasan antara manusia dan entitas di luar dirinya.

Hambor dengan *Mori Keraeng*, yang dimaknai sebagai pengakuan atas dosa dan penebusan, diwujudkan melalui ritus tolak bala yang dikenal sebagai “*kaba oke ndekok*”, di mana kerbau disembelih sebagai persembahan kepada Sang Pencipta. Upacara *kepu munak*¹⁶⁴ di sisi lain, merupakan simbol pertobatan bagi pelaku perzinahan, menunjukkan bahwa proses *hambor* meliputi pelbagai dimensi.¹⁶⁵ Dosa *daku ngong data* mendobrak keharmonisan sosial termanifestasi dalam bentuk pencurian harta benda (*tako ceca data*), perzinahan (*loma wina data*) dan memindah batas tanah ulayat (*wero langang*). Tindakan-tindakan ini tidak hanya menciptakan korban jiwa (*bowo dara*), melainkan juga timbulnya kutukan dari Tuhan, dan menciptakan permusuhan dalam masyarakat.¹⁶⁶

Untuk menyembuhkan luka akibat dari perkelahian, masyarakat Manggarai melakukan upacara *wunis agu tahang* (kunyit dan kapur sirih) sebagai simbol untuk memulihkan hubungan yang retak (*toe curup tau*). Dalam upacara ini masyarakat Manggarai meyakini bahwa *wunis agu tahang* merupakan obat paling mujarab untuk menyembuhkan luka yang parah. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki kecerdasan dalam memecahkan konflik yang membelenggu kehidupan sosial. Pada sisi lain, proses penyelesaian konflik yang menimbulkan permusuhan dan pemfitnahan, masyarakat Manggarai melakukan upacara *emi kole mu’u da’at*,

¹⁶³*Ibid.*, hlm. 62.

¹⁶⁴Upacara *Keput Munak* yang secara harfiah berarti memotong batang pisang dengan menggunakan parang, merupakan ritual paling penting dalam tradisi Manggarai. Ritual ini dilaksanakan sebagai bentuk penebusan dosa perzinahan yang terjadi dalam satu kampung. Melalui *keput munak*, pelaku perzinahan menunjukkan pertobatan dan memohon pengampunan atas kesalahan yang telah diperbuat. Keyakinan masyarakat Manggarai bahwa kegagalan dalam melaksanakan ritual ini akan mendatangkan kutukan, baik bagi pelaku maupun penghuni kampung. Hasil wawancara via telepon dengan Hermanus De, tokoh adat di Kampung Lenteng, pada 10 Januari 2025.

¹⁶⁵Petrus Janggur *op. cit.*, hlm. 208.

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 221.

yang bertujuan untuk menarik kembali kata-kata kasar dan memulihkan kembali relasi yang sudah rusak.¹⁶⁷

Tentu saja bahwa konflik sosial tersebut merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh masyarakat Manggarai. Namun, dalam mengentaskan konflik ini, mereka memiliki sistem rekonsiliasinya sendiri (*hambor*), yang merupakan tiang penyangga dalam menjaga stabilitas sosial yang rentan terhadap konflik. Tujuan utama *hambor* bukan hanya untuk menciptakan kesejahteraan fisik, melainkan juga untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, para leluhur, dan lingkungan, sehingga tercipta keselarasan dan keutuhan hidup bersama.

4.4.2 Rekonsiliasi dalam Gereja Katolik

Kejatuhan manusia dalam dosa berdampak pada pemisahan dirinya dari Allah sebagai sumber keselamatan. Allah sebagai sumber kasih tetap memanggil kembali manusia kepada-Nya agar tidak terikat dosa. Dalam Kitab Suci, rekonsiliasi merupakan proses yang membawa manusia kembali kepada kebenaran Ilahi. Rekonsiliasi termanifestasi melalui sakramen pertobatan, yang menandai perubahan penuh dalam pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Melalui pertobatan, manusia menyadari bahwa cara hidup yang lama menjerumuskannya kepada kebinasaan dan cara hidup yang baru dapat menyelamatkan.¹⁶⁸

Dalam Perjanjian Lama, panggilan untuk bertobat ditujukan kepada bangsa Israel yang diperbudak oleh dosa (Yeh. 33:11). Pertobatan tidak hanya menjadi kewajiban kolektif bangsa Israel, tetapi juga menjadi panggilan bagi setiap individu. Misalnya, Raja Daud (Maz. 51) yang dalam penyesalannya meminta pengampunan Allah atas dosanya.¹⁶⁹ Dalam Perjanjian Baru, panggilan untuk bertobat diperluas kepada seluruh umat manusia. “Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat” (Kis. 17:30).

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm. 209.

¹⁶⁸Jan A. Boersoma, dkk. *Berteologi Abad XXI*, penerj. Tim Literatur Perkantas (Jakarta: Literatur Perkantas, 2015), hlm. 666.

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 667.

Gereja yang dibentuk atas dasar ajaran Kristus, memiliki peran sentral dalam memfasilitasi proses rekonsiliasi antara manusia dengan Allah dan antara anggota Gereja itu sendiri. Imam yang merupakan representasi Kristus atau *in persona Christi* mempunyai kuasa untuk memberi absolusi kepada umat Allah.¹⁷⁰ Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Yesus sesudah kebangkitan-Nya: “Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada” (Yoh. 20:21-22).¹⁷¹ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa wewenang pengampunan dosa, didelegasikan kepada imam yang merupakan manifestasi langsung dari kuasa Ilahi.

Rekonsiliasi tidak hanya memiliki implikasi teologis dalam mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi juga memengaruhi psikologis dan kehidupan sosial seseorang. Artinya, pertobatan bukan sekadar ritus magis yang dituntut oleh peraturan Gereja, melainkan sebuah proses transformatif yang menuntut sikap, mentalitas, dan aksi nyata. Melalui rekonsiliasi, individu yang telah berbuat salah seperti mencuri, hendaknya mengalami penyesalan atas perbuatannya dan berusaha untuk mengubah perilaku. Kesadaran pribadi yang dipicu oleh rekonsiliasi ini, membawa dampak yang besar bagi kehidupan bersama.

Pertobatan merupakan permulaan relasi yang baik dengan Allah. Namun, meskipun telah mengalami rekonsiliasi, manusia tetap rentan terhadap dosa. Realitas ini mengindikasikan bahwa manusia tidak luput dari godaan yang mengantarnya kepada dosa. Pertobatan demikian sebagai proses yang berkelanjutan yang menemani perjalanan hidup manusia. Allah telah mengajarkan untuk mengampuni tanpa batas, “bukan tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali” (Mat. 18:22). Oleh karena itu, imam di paroki-paroki wajib menggalakkan sakramen rekonsiliasi menjelang perayaan-perayaan besar gerejawi. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik bahwa setiap orang beriman yang

¹⁷⁰Albertus Sujoko, *Praktek Sakramen Pertobatan dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 142.

¹⁷¹Tim Gray, *Sacrament in Scripture: Salvation History Made Present*, penerj. Tim Gray (Malang: Penerbit Bioma, 2007), hlm. 90.

sudah dapat menggunakan rasionya, harus mengaku minimal sekali dalam setahun.¹⁷²

4.5 Kesimpulan

Dekadensi moral yang terjadi di era modern ini ditandai dengan pengabaian akan nilai luhur tradisi dan menjadi problematik serius yang perlu ditangani. Revitalisasi pepatah adat dan penggalakan kembali perintah Allah dalam Dekalog merupakan pilihan yang tepat dalam upaya mengentaskan fenomena ini. *Go'et neka daku ngong data* memiliki dimensi moral dan etika yang berfaedah bagi masyarakat pada umumnya, teristimewa masyarakat Manggarai. Pepatah ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari prinsip etika deontologi yang memprioritaskan kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal. Pepatah ini juga mengajarkan individu untuk menghargai hak kepemilikan, menstimulasi kesadaran etis dalam kehidupan bersama agar bertanggung jawab terhadap kebebasannya yang selaras dengan rasa hormat terhadap yang lain. Menjaga keseimbangan dimensi tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial yang mampu membawa kesejahteraan dalam masyarakat.

Dekalog, khususnya perintah ketujuh yang melarang pencurian merupakan imperatif moral yang diwahyukan Allah, menyiratkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum Ilahi dan moralitas universal. Dengan demikian, pepatah adat *neka daku ngong data* dan perintah ketujuh Dekalog saling bersinergis untuk membangun asas etika yang mendorong individu agar melepaskan diri dari ikatan belenggu egoisme dan memperhatikan kesejahteraan dengan memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara komprehensif. Keduanya menjadi instrumen yang tetap relevan dalam mengkonstruksi karakter moral di tengah masyarakat yang majemuk.

¹⁷²*Kitab Hukum Kanonik*, Kanon 989 §2, *op. cit.*, hlm. 420.